



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
YAYASAN PUTRA SOLVA UTAMA
SMP IT BAITURROHMAN GARUT



Email : smp_it_baiturrohman@yahoo.co.id | NSS : 202021137010 | NPSN : 69857727
Kp. Solokpandan 01/ 02 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut Prov. Jawa Barat 44151 Kontak. 0811 2306 783

PENILAIAN SUMATIF AKHIR SEMESTER 1

TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Hari/Tanggal : Selasa, 05 Desember 2023

Kelas : VIII (Delapan) Waktu : 90 menit

Nama :

1. Apa Istilah Pancasila yang di kemukakan menurut Darji Darmodiharjo...

- A. pelaksanaan kesusilaan yang lima
- B. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
- C. Pancasila menjadi salah satu sumber dari segala sumber
- D. Semua jawaban benar

2. Perhatikan narasi berikut di bawah ini!

**PANCASILA SEBAGAI HASIL PERJANJIAN
LUHUR SELURUH BANGSA**

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan perjanjian luhur dari seluruh bangsa. Pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, atau juga disebut sebagai ideologi nasional adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenaran, ketepatan, dan kemanfaatannya bagi bangsa sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya dalam bentuk sikap, perilaku, dan perbuatan

merupakan fungsi Pancasila sebagai ...

- A. Pandangan hidup bangsa Indonesia.
- B. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.
- C. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
- D. Perjanjian luhur.

3. sebutkan tata urutan dan rumusan dalam penulisan / pembacaan / pengucapan sila sila pancasila dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945...

- A. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- B. 1. Peri kebangsaan 2. Peri kemanusiaan 3. Peri ketuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat
- C. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
YAYASAN PUTRA SOLVA UTAMA
SMP IT BAITURROHMAN GARUT



Email : smp_it_baiturrohman@yahoo.co.id | NSS : 202021137010 | NPSN : 69857727
Kp. Solokpandan 01/ 02 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut Prov. Jawa Barat 44151 Kontak. 0811 2306 783

dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

D. 1.Persatuan 2.Keluargaan 3.Keseimbangan lahir dan batin 4.Musyawaharah 5.Keadilan rakyat

4. Dalam Pancasila mempunyai hubungan erat Bagaimanakah hubungan antar sila dalam Pancasila ...

- A. Manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan alam semesta.
- B. Manusia yang satu dengan lainnya serta Tuhan.
- C. saling berkaitan dan mengikat, sebab satu bagian dengan bagian lain tidak bisa dipisahkan
- D. Pemerintah dengan tokoh masyarakat dan rakyat.

5. Bagaimanakah sikap sebagai warga negara yang baik dalam mengamalkan butir-butir yang terdapat dalam Pancasila terutama yang tertuang dalam sila ke tiga..

- A. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara
- B. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain
- C. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia
- D. Menghargai hasil musyawarah

6. pada saat merumuskan Pancasila dan hukum dasar oleh para tokoh ,bagaimanakah suasana kebatinan yang di rasakan oleh para tokoh pendiri bangsa.....

- A. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia
- B. mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan rakyat
- C. Tidak berpihak pada rakyat indonesia
- D. mengedepankan nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan nasionalisme

7.



Dalam wacana di atas bagaimana contoh proses penerapan profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah mu...

- A. menjaga kebersihan lingkungan sekolah
- B. menghargai perbedaan yang ada



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
YAYASAN PUTRA SOLVA UTAMA
SMP IT BAITURROHMAN GARUT



Email : smp_it_baiturrohman@yahoo.co.id | NSS : 202021137010 | NPSN : 69857727
Kp. Solokpandan 01/ 02 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut Prov. Jawa Barat 44151 Kontak. 0811 2306 783

- C. berdoa sebelum memulai pelajaran, mengutamakan persamaan,
D. Semua jawaban salah
8. Dikutip dari buku Hukum Tata Negara Indonesia Teks dan Konteks oleh Retno Widyani (2015), UUD 1945 pernah berhenti digunakan sebagai konstitusi negara ketika Indonesia menganut sistem serikat. Sementara itu, undang-undang dasar negara kemudian diambil alih dengan Konstitusi RIS 1949. Sejak dikukuhkannya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal 17 Agustus 1950, undang-undang dasar tidak pernah mengalami pergantian lagi. Peresmian UUD 1945 tersebut, berdasarkan kepada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dikutip dari buku Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945? Oleh Taufiequrachman Ruki Dkk (2019), UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali, yaitu dalam beberapa Sidang Umum atau Sidang Tahunan MPR sebagai berikut:
1. Amandemen Pertama Amandemen pertama terjadi pada tanggal 14-21 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR
 2. Amandemen Kedua Amandemen kedua terjadi pada tanggal 7-18 Agustus 2000 dalam Sidang Tahunan MPR
 3. Amandemen Ketiga Amandemen ketiga terjadi pada tanggal 1-9 November 2001 dalam Sidang Tahunan MPR
 4. Amandemen Keempat Amandemen keempat terjadi pada tanggal 1-11 Agustus 2002 dalam Sidang Tahunan MPR
- Sistematika UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan Fungsi dari dilakukannya amandemen dalam UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, dan lainnya. Namun, dalam proses amandemen terdapat satu hal penting yang tidak boleh dilakukan, yaitu mengubah pembukaan UUD 1945. Hal tersebut dapat terjadi karena Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Fundamental Negara.
- Dari pernyataan di atas yang menunjukkan sistematika UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen..
- A. Bagian Pembukaan UUD 1945
 - B. Bagian Batang UUD 1945, terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan.
 - C. Bagian Batang UUD 1945, menjadi 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan.
 - D. Batang Tubuh UUD 1945
9. Jelaskan penjabaran kalimat pertama proklamasi kemerdekaan ke dalam alinea ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ?
10. Dari pembukaan UUD 1945, coba jodohkan isi dari makna alinea 1 sampai isi dari makna alinea 4 ke 4



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
YAYASAN PUTRA SOLVA UTAMA
SMP IT BAITURROHMAN GARUT



Email : smp_it_baiturrohman@yahoo.co.id | NSS : 202021137010 | NPSN : 69857727
Kp. Solokpandan 01/ 02 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut Prov. Jawa Barat 44151 Kontak. 0811 2306 783

ALINEA 1945	UUD	MAKNA ALINEA UUD 1945
Alinea I		menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Adapun cita-cita tersebut ialah ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Alinea II		Pancasila, tujuan negara, dan bentuk negara yaitu republik yang berkedaulatan rakyat.
Alinea III		Bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Alinea IV		kemerdekaan Indonesia dan pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

11. Dari pernyataan manakah yang paling tepat urutan dari sistematika bagian pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945

- A.1. disahkan MPR dalam sidang umum pada 19 Oktober 1999,
2. disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 18 Agustus 2000,
3. Perubahan ketiga disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 9 November 2001,
4. Perubahan keempat disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 10 Agustus 2002
- B. 1. Perubahan ketiga disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 9 November 2001,
2. Perubahan keempat disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 10 Agustus 2002
3. disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 18 Agustus 2000,
4. disahkan MPR dalam sidang umum pada 19 Oktober 1999,
- C. 1. Perubahan keempat disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 10 Agustus 2002
2. disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 18 Agustus 2000,
3. disahkan MPR dalam sidang umum pada 19 Oktober 1999,
4. Perubahan ketiga disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 9 November 2001,
- d. 1. Perubahan ketiga disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 9 November 2001,
2. disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 18 Agustus 2000,
3. disahkan MPR dalam sidang umum pada 19 Oktober 1999,
4. Perubahan keempat disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 10 Agustus 2002



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
YAYASAN PUTRA SOLVA UTAMA
SMP IT BAITURROHMAN GARUT



Email : smp_it_baiturrohman@yahoo.co.id | NSS : 202021137010 | NPSN : 69857727
Kp. Solokpandan 01/ 02 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut Prov. Jawa Barat 44151 Kontak. 0811 2306 783

12. Berbicara mengenai rencana amandemen UUD 1945, sebenarnya apa saja syarat yang harus dipenuhi agar bisa dilakukan? Berikut ini penjelasan syarat-syarat amandemen UUD 1945 di Indonesia sesuai dengan pasal 37 UUD 1945:

1. Usul Perubahan Diajukan oleh Minimal 1/3 Anggota MPR

Di dalam pasal 37 ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa usulan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945 harus diajukan oleh minimal satu per tiga dari seluruh anggota MPR. Anggota MPR sendiri terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

2. Alasan Terhadap Perubahan Pasal Tersebut Haruslah Jelas

Selanjutnya, pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap usulan terhadap pasal dalam UUD harus disampaikan dengan jelas mana bagian yang hendak diubah beserta dengan alasannya. Alasannya pun harus valid dan dapat dibuktikan agar MPR dapat menerimanya.

3. Sidang MPR Harus Dihadiri Minimal 2/3 Anggota MPR

Pasal 37 ayat (3) mengatur bahwa sidang untuk memutuskan apakah usulan perubahan pasal UUD 1945 harus dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota MPR. Apabila anggota yang hadir kurang dari jumlah tersebut, maka sidang tidak dapat dilanjutkan.

4. Keputusan Perubahan Harus Disetujui Minimal 50% + 1 Anggota MPR

Berdasarkan ayat (4) pasal 37, keputusan apakah pasal UUD 1945 dapat diubah harus disetujui oleh minimal 50%+1 atau setengah dari jumlah anggota MPR dan ditambah satu orang dari anggota MPR pula. Apabila kurang dari jumlah ini, maka perubahan terhadap pasal UUD 1945 tidak dapat dilakukan dan harus melalui prosedur kembali dari awal agar dapat mengubah pasal yang dikehendaki.

5. Pasal Mengenai Bentuk Negara Tidak Dapat Diubah

Dalam ayat terakhir mengenai perubahan pasal dalam UUD 1945, terdapat aturan bahwa khusus pasal mengenai bentuk negara kesatuan Indonesia ini tidak dapat diubah dengan alasan apapun. Hal ini sebagai bentuk trauma psikologis bangsa ini ketika masa penggunaan bentuk negara serikat. Saat itu terjadi banyak konflik sosial dan politik, baik yang berupa konflik antara rakyat di daerah atau di tingkat nasional yang menunjukkan bahwa negara ini tidak cocok dengan bentuk negara serikat.

Dari narasi di atas berapakah jumlah anggota MPR yang dapat mengajukan usulan perubahan UUD...

- A. sepertiga dari seluruh anggota MPR
- B. Usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan kepada Pimpinan MPR oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau 237 anggota.
- C. seperdua dari seluruh anggota MPR



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
YAYASAN PUTRA SOLVA UTAMA
SMP IT BAITURROHMAN GARUT



Email : smp_it_baiturrohmah@yahoo.co.id | NSS : 202021137010 | NPSN : 69857727

Kp. Solokpandan 01/ 02 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut Prov. Jawa Barat 44151 Kontak. 0811 2306 783

D. semua jawaban benar

13. Dari pernyataan narasi no 12, Berapa jumlah anggota MPR yang harus hadir dalam perubahan UUD?

- A. seperempat dari seluruh anggota MPR. Saat ini anggota MPR (gabungan anggota DPR dan anggota DPD) berjumlah 711 anggota. “Jadi minimal amandemen UUD harus diajukan oleh 237 anggota.
- B. seperdua dari seluruh anggota MPR. Saat ini anggota MPR (gabungan anggota DPR dan anggota DPD) berjumlah 711 anggota. “Jadi minimal amandemen UUD harus diajukan oleh 237 anggota.
- C. sepertiga dari seluruh anggota MPR. Saat ini anggota MPR (gabungan anggota DPR dan anggota DPD) berjumlah 711 anggota. “Jadi minimal amandemen UUD harus diajukan oleh 237 anggota.
- D. seperlima dari seluruh anggota MPR. Saat ini anggota MPR (gabungan anggota DPR dan anggota DPD) berjumlah 711 anggota. “Jadi minimal amandemen UUD harus diajukan oleh 237 anggota.

14. Apa saja yang menjadi kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945.....

- A. Tidak Mengubah Pembukaan UUD 1945, dengan tetap mempertahankan naskah aslinya
- B. Boleh Mengubah Pembukaan UUD 1945
- C. perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- D. Semuanya Benar

15. Apa yang menjadi alasan tidak dapat diubahnya Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

- A. pembatasan perubahan bentuk NKRI
- B. Karena di dalam bagian pembukaan terdapat dasar dan ideologi negara. Dalam pembukaan UUD NRI juga terdapat cita-cita berdirinya NKRI.
- C. keinginan membentuk negara kesatuan
- D. semua jawaban salah

16. Dari setiap lembaga-lembaga negara siap saja yang berhak mengajukan Undang-Undang

- A. MPR
- B. Mahkamah Agung
- C. Anggota, komisi, atau gabungan komisi.
- D. Mahkamah Konstitusi

17. Teori Kedaulatan sendiri memiliki lima teori yang diterapkan pada berbagai negara di dunia. Ini penjelasannya.

- 1. Kedaulatan Tuhan Menurut teori Kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara hanya satu yaitu Tuhan. Oleh karena itu, negara dan pemerintah negara harus mewakili Tuhan dalam menjalankan hukum Tuhan di dunia. Teori yang dikemukakan oleh Agustinus dan Thomas Aquino ini meyakini bahwa lahirnya suatu negara hanya dapat terjadi apabila dikehendaki oleh Tuhan. Ciri khas negara yang menganut paham ini adalah ia tidak membedakan urusan negara dari urusan agama, atau sebaliknya. Negara yang menganut paham ini dikenal juga dengan negara



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
YAYASAN PUTRA SOLVA UTAMA
SMP IT BAITURROHMAN GARUT



Email : smp_it_baiturrohmah@yahoo.co.id | NSS : 202021137010 | NPSN : 69857727
Kp. Solokpandan 01/ 02 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut Prov. Jawa Barat 44151 Kontak. 0811 2306 783

teokrasi. Seorang raja atau penguasa dianggap akan dianggap sebagai wakil Tuhan. Negara yang menganut teori ini adalah Jepang.

2. Kedaulatan Negara Teori selanjutnya adalah teori Kedaulatan Negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada pada negara itu sendiri. Negara dipandang sebagai sumber kekuasaan. Kehendak negara dimuat dalam undang-undangan dan dijadikan sebagai sumber hukum yang utama. Hukum dibuat untuk kepentingan negara dan negara tidak dibatasi oleh hukum. Teori ini berkembang pada abad 15 dengan tokohnya Georg Jellinek. Adapun negara yang menganut Kedaulatan Negara adalah Rusia pada masa kepemimpinan Joseph Stalin.
3. Kedaulatan Raja Kedaulatan Raja adalah teori kedaulatan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja. Sebab, raja dianggap sebagai keturunan dewa. Raja berkuasa secara mutlak atau absolut. Dengan demikian, raja dapat berbuat sesuai kehendaknya atau tirani dan tidak tunduk pada konstitusi. Teori ini dicetuskan oleh Jean Bodin dan Hegel. Sementara contoh negara yang menganut Kedaulatan Raja adalah Prancis dan Jerman pada masa Adolf Hitler.
4. Kedaulatan Hukum Kemudian terdapat pula Kedaulatan Hukum. Kedaulatan Hukum artinya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Oleh karena itu, negara, pemerintah, pengadilan, dan rakyat seluruhnya harus tunduk pada hukum. Pemegang kekuasaan atau penyelenggara negara harus tunduk sepenuhnya kepada hukum. Tokoh teori ini adalah Krabbe, Immanuel Kant, dan Kronenberg.
5. Kedaulatan Rakyat Teori kedaulatan terakhir adalah Kedaulatan Rakyat. Menurut teori ini, kedaulatan berada di tangan Rakyat dan negara menempatkan rakyat pada kedudukan yang tertinggi.

Dari narasi di atas tentang beberapa teori kedaulatan manakah yang paling sesuai di terapkan di negara indonesia...

- A. Teori Kedaulatan Rakyat
 - B. Teori Kedaulatan Hukum
 - C. Teori Kedaulatan Raja dan teori Kedaulatan Tuhan
 - D. Teori Kedaulatan Negara
18. Mengenai dasar hukum tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, manakah yang paling sesuai tata urutan peraturan perundangan yang ada di Indonesia....
- A. UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perdakabupaten/kota.
 - B. UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perdakabupaten/kota.
 - C. Perdakabupaten/kota, PP, Perpres, Perda Provinsi
 - D. UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perdakabupaten/kota.



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
YAYASAN PUTRA SOLVA UTAMA
SMP IT BAITURROHMAN GARUT



Email : smp_it_baiturrohman@yahoo.co.id | NSS : 202021137010 | NPSN : 69857727

Kp. Solokpandan 01/ 02 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut Prov. Jawa Barat 44151 Kontak. 0811 2306 783

19. Bagaimana ketentuan untuk mencabut atau mengubah Perppu menjadi Undang-Undang Apakah ketentuan Perppu bisa berubah menjadi Undang-Undang..
- A. Apabila Perpu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan Undang-Undang (UU)
 - B. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan
 - C. Apabila Perpu itu disetujui oleh MPR, akan dijadikan Undang-Undang (UU)
 - D. Semua jawaban salah
20. Bagaimanakah alur yudisial reviu UU jika bertentangan dengan UUD atau peraturan lain dibawahnya yang bertentangan dengan UU
- A. pengujian UU ("PUU") terhadap UUD 1945 dapat dimohonkan ke MPR
 - B. pengujian UU ("PUU") terhadap UUD 1945 dapat dimohonkan ke DPR
 - C. pengujian UU ("PUU") terhadap UUD 1945 dapat dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi ("MK"), sedangkan *judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU menjadi wewenang Mahkamah Agung ("MA").
 - D. Semua jawaban benar

21.



1. Menerobos Lampu Merah

Sahabat pasti sering menemui contoh pelanggaran rambu lalu lintas. Lampu merah menyala, namun diterobos oleh si pengendara mobil atau motor. Hal ini mereka lakukan dengan dalih terburu-buru atau tidak sempat melihat lampu lalu lintas. Menurut sebuah penelitian, contoh kasus semacam ini cukup sering terjadi di kota-kota besar. Kasus pelanggaran lalu lintas ini tergolong berbahaya. Soalnya, si penerobos lampu merah bisa saja ditabrak atau menabrak oleh kendaraan lain, bila tidak hati-hati.

2. Melawan Arus Jalan

Melawan arus tren kehidupan adalah hal yang keren. Namun, tidak berlaku untuk melawan arus jalan. Melakukan hal itu akan berisiko menimbulkan kecelakaan antar pengendara. Salah satu contoh nyatanya terjadi pada 2014 silam.



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
YAYASAN PUTRA SOLVA UTAMA
SMP IT BAITURROHMAN GARUT



Email : smp_it_baiturrohman@yahoo.co.id | NSS : 202021137010 | NPSN : 69857727
Kp. Solokpandan 01/ 02 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut Prov. Jawa Barat 44151 Kontak. 0811 2306 783

Saat itu, ada seorang pengendara motor yang nekat melawan arus jalan karena takut kena razia polisi. Akibatnya, si pengendara yang membawa istrinya itu tertabrak kendaraan lain. Dan yang lebih ironisnya lagi, istri dari si pengendara terpelanting dan tewas.

3. Tidak Membawa Surat Kelengkapan Berkendara

Kalau yang satu ini lazim dilakukan oleh pengendara di semua umur. Namun, yang paling sering melakukannya adalah pengendara motor yang masih di bawah umur.

Mereka lazim melakukan hal itu karena ingin segera mengendarai motor mereka ke jalanan, padahal belum cukup umur dan belum layak punya surat kelengkapan berkendara.

4. Mengendarai Kendaraan dengan Muatan Berlebih

Seringkali ditemukan banyak pengendara yang membawa muatan melebihi kapasitas. Contohnya saja adalah pengendara motor yang membawa muatan sebanyak 3 atau bahkan 4 orang.

Selain melanggar aturan, melakukan hal tersebut akan sangat membahayakan nyawa si pengendara. Sudah banyak pengendara motor yang mengalami kecelakaan akibat membawa muatan melebihi kapasitas.

Solusi dan Penyelesaian untuk Kasus Pelanggaran Lalu Lintas :

Memberi sanksi pelanggaran lalu lintas mungkin adalah penyelesaian terbaik. Khususnya, untuk kasus pelanggaran lalu lintas. Namun, hal itu sifatnya cenderung jangka pendek. Jika ingin menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas untuk jangka panjang, maka kita harus melakukan langkah pencegahan. Hal itu dilakukan guna memperkecil kasus pelanggaran lalu lintas di negara kita.

Ada beberapa langkah pencegahan yang mungkin bisa dilakukan. Langkah-langkah itu adalah:

1. Masyarakat mesti berinisiatif untuk mempelajari seperti apa peraturan lalu lintas, [macam rambu lalu lintas](#), serta contoh pelanggaran. Mempelajari hal tersebut bisa dilakukan dimana saja, entah di rumah, di sekolah, atau di tempat kursus mengemudi.
2. Untuk Sahabat yang punya anak-anak di bawah umur, mohon untuk tidak mengizinkan mereka untuk membawa kendaraan umum di jalan raya. Kalaupun mau belajar mengendarai motor, Sahabat bisa melakukannya di lingkungan sekitar yang cukup aman. Pastikan untuk memberitahu mereka apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berkendara di jalan raya.
3. Pihak kepolisian mesti lebih rutin melakukan patroli di daerah rawan pelanggaran lalu lintas. Bila perlu, tambah pos penjagaan di daerah-daerah tersebut. Sebisa mungkin pihak terkait juga bisa memberi contoh bagaimana cara mentaati peraturan lalu lintas yang baik dan benar.

Bagaimanakah perilaku yang sesuai dengan narasi di atas...

- A. Menjaga nama baik lingkungan masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
YAYASAN PUTRA SOLVA UTAMA
SMP IT BAITURROHMAN GARUT



Email : smp_it_baiturrohman@yahoo.co.id | NSS : 202021137010 | NPSN : 69857727
Kp. Solokpandan 01/ 02 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut Prov. Jawa Barat 44151 Kontak. 0811 2306 783

- B. Bersikap patuh terhadap aturan akan memberikan manfaat besar bagi pelakunya. Terlebih, menaati hukum juga lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Sebagai misal, orang yang tidak taat rambu-rambu lalu lintas akan membahayakan dirinya dan berujung kena tilang polisi.
- C. Bersikap acuh terhadap aturan yang berlaku dan tidak menghiraukan aturan yang berlaku, Sebagai
- D. tidak menghiraukan himbauan dan aturan yang berlaku di setiap negara
22. Bagaimana menemukan cara bijak menyikapi sikap politik OPM (Operasi Papua Merdeka) yang menjadi terjadi di negara Indonesia...
- A. Ada proses dialog yang dibangun melalui Komnas HAM, ada proses pembangunan yang berjalan, melalui pembangunan kesejahteraan. Ini akan terus berlanjut,
- B. Harus melawan segala tindakan segala tindakan yang di lakukan OPM (Operasi Papua Merdeka)
- C. membiarkan segala bentuk yang di lakukan oleh OPM (Operasi Papua Merdeka)
- D. melakukan perang dengan OPM (Operasi Papua Merdeka)
23. makna hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tepat adalah.
- A. peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
- B. peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan.
- C. kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah ditemukan kembali dan mudah ditelusuri.
- D. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah
24. perhatikan gambar dibawah ini!



Dari gambar disamping mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, lengkapilah peraturan yang sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

25. Jelaskan bagaimanakah urutan yang tepat mengenai proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 ?